



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 850/II/2015

III/FEBRUARI 2015



DPR SEPAKATI 159 RUU PROLEGNAS 2015-2019



DPR SEPAKATI 159 RUU PROLEGNAS 2015-2019

Rapat Paripurna DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon Senin (9/2) menyetujui 159 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.

Dalam laporannya Ketua Badan Legislasi (Baleg), Sareh Wiyono menyebutkan daftar Prolegnas disaring dari sekitar 324 RUU. Sebanyak 155 diantaranya merupakan inisiatif DPR, 84 usulan pemerintah dan 85 RUU disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam Paripurna disepakati pula 37 RUU yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2015 diantaranya RUU Pertanahan, RUU Pilkada, RUU KUHP, RUU KUHAP, dan RUU Pertembakauan. "Kami optimis akan tercapai target legislasi tersebut," tutur Sareh usai rapat.

Ia menambahkan, daftar Prolegnas diajukan atas dasar urgensi dan norma pembentukan Undang-Undang. Adapun RUU prioritas dipilih berdasarkan kelengkapan naskah akademik.

Penetapan Prolegnas 2015-2019 diwarnai sejumlah interupsi dari anggota dewan yang mempertanyakan RUU yang gagal menjadi bagian dari Prolegnas. Anggota Komisi X dari FPP Leni Marlinawati meminta penjelasan kenapa RUU Kebudayaan terlempar dari daftar.

RUU Kebudayaan menurutnya merupakan rancangan yang pernah dibahas pada dewan periode lalu. Ia tetap mempertahankan pendapatnya agar RUU ini bisa menjadi bagian dari Prolegnas apalagi naskah akademik maupun draf RUU telah tersedia.



Ketua Badan Legislasi DPR Sareh Wiyono

Putusan Tingkat I di Baleg

Langkah awal pembahasan Prolegnas dimulai Baleg bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM serta DPD dengan menyaring 324 RUU yang masuk sebagai usulan. Hasilnya, terdapat sejumlah RUU yang memiliki kesamaan judul maupun substansi sehingga totalnya sebanyak 297 RUU.

Pemilahan juga dilakukan berdasarkan Pasal 107 Ayat (6) Tata Tertib DPR, setiap komisi paling banyak mengusulkan dua RUU dalam satu tahun.

Setelah melakukan seleksi ketat disepakati angka ideal RUU untuk lima tahunan berjumlah sekitar 150-an RUU dengan 30-an RUU tiap tahun. Seleksi ini mengacu pada teknis substansial yang melihat urgensi dari adanya RUU dan parameter teknis prosedural yang melihat dari kelengkapan naskah akademik dan draf RUU.

Dalam rapat pleno Baleg sebagai putusan tingkat satu berhasil ditetapkan 37 RUU sebagai Prioritas Tahun 2015, dengan rincian 21 RUU usulan DPR, 7 RUU usulan pemerintah, dan 1 usulan DPD.

Selain itu, juga disepakati RUU Kumulatif Terbuka, meliputi RUU Ratifikasi Perjanjian Internasional, RUU akibat Putusan MK, RUU APBN, RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta RUU berasal dari Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU menjadi UU.

"Saya mengharapkan kepada teman-teman Anggota DPR bekerja semaksimal mungkin, sehingga target RUU ini dapat tercapai dengan baik," demikian Sareh. (sc) foto: iwan armanias/parle/hr

Fadli Zon : Serumpun Bambu Sejuta Manfaat

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon melakukan penanaman pohon bambu jenis petung hitam di Bantaran Sungai Ciliwung Kampung Muara Beres, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (12/2).

Sekitar 100 tanaman bambu dari Rumah Bambu Jatnika,

ditanam sebagai langkah nyata mengantisipasi terjadinya banjir yang saat ini tengah melanda Jakarta.

"Kegiatan penanaman ini adalah momentum yang pas, karena Jakarta sedang dilanda banjir hingga ke Istana Merdeka. "Dan sebenarnya di wilayah Jakarta juga harus di-



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menanam bambu petung

tata sedemikian rupa agar air itu bisa terserap,” ungkap Fadli disela-sela penanaman bambu.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa tanaman bambu adalah salah satu tanaman dengan sejuta manfaat yang perlu dilestarikan sekaligus menjadi ciri budaya Sunda. Salah satunya bisa digunakan sebagai benteng di bantaran

sungai. “Sebenarnya sungai tidak perlu dibeton untuk bentengnya, dengan menggunakan bambu pun bisa. Karena bisa menyerap air dan penyangga yang kuat,” jelasnya.

Fadli melanjutkan, pihaknya akan menanam lebih banyak lagi pohon-pohon di sepanjang aliran sungai ciliwung. “Tidak hanya tanaman bambu, pohon-pohon langka juga sudah ditanam di hulu Ciliwung. “Kita sudah tanami pohon-pohon langka seperti pohon Sentul, Gandarian dan Katulampa,” tambahnya.

Sementara pemilik Yayasan Rumah Bambu Jatnika, H. Jatnika Nanggamihardja, menyambut baik kegiatan penanaman pohon tersebut. Menurutnya, tanaman bambu itu memiliki fungsi ekologi yaitu penghasil oksigen yang cukup besar, sebagai penahan longsor dan erosi tanah. Dari sisi sejarah, bambu juga tidak bisa diremehkan karena menjadi senjata utama melawan penjajah sebagai bambu runcing. “Dengan serumpun bambu kita guncang dunia,” seru Kang Jatnika penuh semangat.

“Mudah-mudahan pohon-pohon ini bisa terus tumbuh dan menjadi solusi banjir Jakarta juga. Dengan serumpun bambu sangat bermanfaat dan menjadi alat pemersatu bangsa,” pungkask Fadli. (od), foto:naefuroji/parle/hr

Tata Ulang Kawasan Senayan

Segecap pejabat negara sepakat untuk menata kawasan perkantoran di Senayan. Hal ini sebagai langkah dalam rangka modernisasi parlemen. Namun, langkah ini harus juga mendapat dukungan dari pemerintah. Proses modernisasi ini harus digerakkan oleh pemimpin nasional.

Demikian salah satu kesimpulan dalam rapat konsultasi antara Pimpinan DPR, yang didampingi Pimpinan Komisi II dan Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga. Hadir pula Wakil Ketua MPR, Ketua DPD, Sekretaris Menteri Sekretariat Negara, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (BLU-PPKGBK).

“Ini dalam rangka memodernisasi legislatif. Kami ingin yang mengambil modernisasi ini bukan hanya parlemen, karena pengguna kuasa dan perencanaan pembangunan masih pemerintah. Maka kami lebih setuju, pemerintah juga terlibat dalam masalah ini,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, usai rapat konsultasi, di ruang rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Selasa (10/02/15).

Politisi asal Dapil NTB ini menambahkan, Pemerintah sebagai eksekutif juga dilibatkan dalam proses modernisasi ini. Sehingga tidak terkesan DPR saja yang ingin membangun kejayaan sendiri, melainkan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga, ini nantinya bukan hanya menjadi *concern* dari DPR, MPR ataupun DPD, tapi juga Pemerintah.

“Kawasan ini adalah kawasan kebanggaan Bangsa Indonesia, yang harus dilihat oleh anak-anak kita, yang datang ke sini melihat sebagai suatu kebanggaan. Di sinilah semua permasalahan bangsa Indonesia diselesaikan. Ini harus dimodernisasi, citra lama harus dihilangkan,” tambah Politisi F-PKS ini.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

II Ahmad Riza Patria menyatakan, kawasan yang ada di Parlemen ini akan ditata kembali agar lebih komprehensif. Termasuk Taman Ria, TVRI, dan Kemenpora, agar dapat menunjang peran, tugas dan fungsi dari Parlemen. Dalam rapat konsultasi itu disetujui, Gedung Kemenpora dapat digunakan oleh DPD, dan perlunya persiapan kantor Kemenpora yang baru di Kawasan Gelora Bung Karno.

“Kita ingin menata kawasan ini agar lebih baik. Kita menyiapkan berbagai fasilitas yang dapat mendukung tugas Parlemen, khususnya DPD. Selama ini DPD tidak memiliki tempat tersendiri, karena masih menumpang di Gedung MPR. Sehingga akan memanfaatkan Gedung Kantor Kemenpora, yang terletak di Kompleks Parlemen, untuk dapat digunakan dan difungsikan untuk tugas-tugas DPD,” jelas Politisi

Gerindra ini.

Imbuhnya, tambah Riza, tentu kantor Kemenpora harus dipindahkan. Jika kantor Kemenpora dipindahkan, akan tetap berada di Kompleks Gelora Bung Karno. Karena kawasan Gelora Bung Karno memang merupakan tugas dari Kemenpora dalam hal pemanfaatan dan pengelolannya.

“Kemenpora juga tidak keberatan jika kantornya digunakan untuk kepentingan DPD, kita ingin pemindahannya tetap di kawasan Senayan. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden setuju, termasuk persiapan anggaran,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Barat III ini. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR Apresiasi Dukungan UNDP



Pimpinan DPR RI saat menerima delegasi UNDP

DPR mengapresiasi dukungan dan bantuan UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam memajukan agenda pembangunan di tingkat global dan kawasan, termasuk di Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Ketua DPR RI Setya Novanto dengan Kepala UNDP, Ms Helen Clark,

Senin (9/2) di ruang tamu Pimpinan DPR, Senayan Jakarta.

“Kerjasama Indonesia dengan UNDP selama ini telah berjalan sangat baik, hal itu terlihat dari adanya dukungan UNDP terhadap program-program pembangunan yang berkaitan dengan pencapaian MDGs dan pengentasan

kemiskinan, pencegahan dan pemulihan kirisi, serta lingkungan hidup dan perubahan iklim,” ungkap Ketua DPR, Setya Novanto.

Dijelaskan Novanto, dukungan UNDP terlihat saat proses pembangunan demokrasi di Indonesia, yakni tatkala Indonesia tengah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 1999 lalu. Ketika itu merupakan pemilihan umum demokratis pertama di Indonesia sejak tahun 1955.

Sedikit banyak bantuan teknis yang diberikan UNDP itu telah membawa Indonesia pada penyelenggaraan Pemilu 1999 yang relatif damai, jujur, dan adil. Hal itu menjadi pelajaran dan akhirnya mempermudah penyelenggaraan pemilu-pemilu selanjutnya.

Selain itu, menurut Novanto program UNDP di bidang pemajuan hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan di Indonesia merupakan suatu hal yang positif. Oleh karena itu ke depannya, pihaknya sangat mendukung pengembangan dan peningkatan program ini.

(Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Neraca Perdagangan Indonesia – Mesir Diharap Meningkatkan

Neraca perdagangan Indonesia pada periode 2009-2013 tumbuh positif 10,48 persen per tahun, dengan nilai perdagangan sebesar USD 1,25 miliar. DPR berharap, neraca perdagangan kedua negara dapat ditingkatkan ke depannya.

Demikian salah satu pembahasan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan Duta Besar Negara Mesir Bahaaeldeen Dessouki. Dalam kesempatan ini, Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan. Hadir pula Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dan Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno.

“Investasi kedua negara semakin



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

baik. Diharapkan, hubungan kerjasama ini dapat ditingkatkan,” kata Novanto, saat pertemuan di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Lantai 3, Senin (9/02/15).

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Agus Hermanto. Ia menyatakan, walaupun neraca perdagangan sudah cukup tinggi, ia berharap neraca perdagangan perlu ditingkatkan. Apalagi, Indonesia sudah memiliki Undang-undang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UU PTSP), sehingga memudahkan izin investasi.

“Saat ini, neraca perdagangan antara kedua negara menurut Mesir sudah cukup tinggi, namun menurut saya ini

masih terlalu kecil, sehingga perlu ditingkatkan. Di Indonesia juga sudah ada UU PTSP, sehingga mengurus izin lebih mudah dan lebih praktis. Tentunya ini memberikan kesempatan kepada para investor, bukan hanya kepada Mesir, tetapi juga dari negara lain, dapat menjalankan investasinya di Indonesia,” jelas Agus.

Politisi Demokrat ini menambahkan, ada beberapa sektor yang perlu digalakkan agar meningkatkan neraca perdagangan. Indonesia memiliki banyak kilang minyak, sehingga diharapkan Indonesia dapat mengeksplor bahan setengah jadi ke Mesir. Dibalik itu, Mesir memiliki banyak ahli perminyakan, ditunjang teknologi perminyakan yang cukup tinggi, dimana Indonesia membutuhkan investasi perminyakan. Sehingga Mesir dapat memperkuat investasi perminyakan.

Pembahasan berikutnya mengenai kerjasama penerbangan antar kedua negara. Dimana saat ini hanya ada Egypt Air yang sudah membuka rute penerbangan ke Indonesia, sementara maskapai penerbangan Indonesia belum ada yang membuka rute penerbangan ke Mesir.

“Kerjasama penerbangan sekarang ini ada Egypt Air yang sudah membuka rute ke Indonesia. Kita harapkan, Garuda Indonesia dapat membuka rute ke Mesir. Sebenarnya Mesir sangat membuka kesempatan itu seluas-luasnya kepada Garuda, memang Garuda belum ada keinginan membuka rute ke sana,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Terkait dengan bidang pendidikan, Agus menyampaikan banyak pelajar Indonesia yang berkuliah di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Namun, saat

ini sedang terjadi penurunan pengiriman pelajar Indonesia ke Universitas Al Azhar, maupun pertukaran pelajar kedua negara.

“Saya minta keberpihakan Mesir kepada Indonesia, beasiswa kepada pelajar Indonesia perlu ditingkatkan. Termasuk keamanan kepada pelajar Indonesia selama di Mesir,” tambah Agus.

Masih dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya 14 supporter Mesir dalam pertandingan sepakbola, antara Zamalek versus Enppi. Dikabarkan, terjadi kerusuhan di luar stadion, dimana para penonton yang tidak mendapat tiket, memaksa masuk ke dalam stadion. (sf), foto : iwan armanias/parle/hr.

Kesamaan Budaya dan Sejarah Lekatkan Hubungan Indonesia-Madagaskar

Hubungan sejarah yang terjalin sangat lama dan kesamaan budaya antara Indonesia dengan Madagaskar memudahkan jalan hubungan bilateral kedua negara semakin erat. Saat ini kerja sama ekonomi sedang dibangun oleh Madagaskar dengan Pemerintah Indonesia.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan Delegasi Parlemen Madagaskar di DPR, Senin (9/2). Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Parlemen Madagaskar Razafinantsoa Hanitriniainio sebagai pemimpin delegasi beserta beberapa anggota parlemen Madagaskar. Sementara Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais.

Kerja sama ekonomi kedua negara hingga saat ini, memang belum menunjukkan angka signifikan. Untuk itu, lewat kesamaan budaya dan sejarah diharapkan bisa menjembatani hubungan kerja sama ekonomi yang menguntungkan kedua negara. “Di mata Indonesia, Madagaskar sudah tak asing lagi. Kami berharap kedua negara bisa semakin erat jalinan hubungan,” kata Fadli dalam pertemuan tersebut.

Untuk mulai membangun kerja sama ekonomi, delegasi Parlemen Madagaskar sendiri direncanakan bertemu dengan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Ketua Kadin Indonesia. Parlemen Madagaskar sendiri sudah berada di Indonesia sejak tanggal 7 Februari dan mengakhiri kunjungan hingga tanggal 10 Februari 2015.

“Ini kunjungan pertama mereka ke Indonesia. Sangat



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima Delegasi Parlemen Madagaskar

menggembirakan, meskipun secara ekonomi kerja samanya masih terbatas. Namun, kalau kita lihat secara historis dan budaya, kita memiliki hubungan masa lalu yang sudah berabad-abad lamanya. Kedatangan orang Indonesia ke Madagaskar sudah dimulai sejak zaman Sriwijaya. Apalagi banyak kosa kata bahasa kedua negara yang mirip,” ungkap Fadli lagi.

Dalam pertemuan tersebut, Razafinantsoa juga menuturkan, ada kosa kata bahasa kedua negara yang sama, seperti kata “lima puluh” dan “selamat”. Bahkan, banyak orang Madagaskar berasal dari Indonesia. “Kami merasa tidak asing di sini, bahkan seperti orang Indonesia sendiri,” aku Razafinantsoa. (mh), foto : naefurodjie/parle/hr.

Ketua DPR Resmikan Gedung Parkir Motor



Ketua DPR RI Setya Novanto meresmikan gedung parkir motor

Komplek Parlemen Senayan Jakarta memiliki fasilitas baru, gedung parkir khusus untuk sepeda motor. Kehadiran sarana ini diharapkan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi karyawan, dan wartawan. Hampir

4.000 pengguna motor yang datang ke gedung DPR setiap harinya.

“Gedung parkir ini sudah bisa digunakan walaupun masih ada hal yang disempurnakan. Mari kita pelihara gedung parkir ini, semoga bisa men-

dukung kinerja kesetjanaan menjadi lebih baik, wartawan semakin kuat dan DPR semakin baik,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto saat upacara peresmian, di Jakarta, Jumat (6/2/15).

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga mengakui gedung parkir ini baru dapat menampung sekitar 700 motor, masih jauh dari memadai. Ia berharap tempat parkir sepeda motor lainnya yang terletak di halaman Gedung Nusantara I juga bisa diperbaiki, dilengkapi atap dan fasilitas pendukung lain.

Bicara pada kesempatan yang sama Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan memperhatikan kapasitas yang ada maka gedung parkir baru dapat digunakan oleh karyawan Setjen dan wartawan. “Fasilitas ini sebaiknya diprioritaskan untuk karyawan dan wartawan dulu, sementara tenaga ahli dan sespri bisa parkir di dekat gedung Nusantara I karena tugasnya memang tidak jauh dari situ,” papar dia. (iky),

foto : andri/parle/hr.

Pimpinan DPR Paparkan Konsep Parlemen Modern Kepada Media Grup

Pimpinan DPR RI terdiri Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah Kamis (5/2) sore melakukan kunjungan ke kantor Metro TV dan Media Indonesia. Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi antara DPR dan Media Group.

Menurut Ketua DPR, kunjungan ini sangat bermanfaat untuk menjalin kerjasama yang baik antara DPR dan media massa dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memperoleh informasi yang utuh tentang kegiatan DPR RI.

Pada acara ini Pimpinan DPR diterima Pimpinan Redaksi Metro TV Putra Nababan, Wakil Pimpinan Redaksi Najwa Shihab, Deputi Direktur Pemberitaan Gaudensius Suhardi dan Kepala Peliputan Charles Meikyansyah serta jajaran Media Group lainnya.

Lebih lanjut Setya Novanto mengungkapkan, DPR sekarang lebih mendekati diri kepada pers atau jajaran wartawan baik elektronik maupun cetak. DPR sekarang ini ingin melakukan perubahan dengan konsep baru yang disebut Parlemen Modern. Fokus utama dari Parlemen Modern yaitu teknologi informasi, keterbukaan akses informasi dan fungsi representasi.

Untuk itu, DPR membuka akses yang seluas-luasnya dengan elemen masyarakat baik langsung maupun melalui teknologi. DPR kini telah didukung teknologi informasi, mulai website, Twitter, Facebook, SMS, Majalah dan bulletin



Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berkunjung ke Media Grup

serta TV Parlemen. Akses yang luas tersebut dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada kalangan pers termasuk Metro TV, Media Indonesia dan media lain yang selanjutnya dapat dikemas secara profesional.

“Misalnya yang berkaitan dengan keputusan DPR, termasuk Undang-Undang, kita minta masyarakat mendapat informasi lengkap setelah media mengakses informasi dari DPR,” ungkap Setya Novanto.

DPR menyadari semua produk-produk dari lembaga legislatif seperti perjanjian dengan negara lain, hal-hal yang berkaitan dengan sidang-sidang, pembentukan perundang-

undangan, hingga keputusan terkait kebijakan negara, belum seluruhnya bisa secara cepat diketahui publik. Dari indikator itu, DPR akan lebih terbuka termasuk memberi peluang masyarakat untuk dapat mengoreksi DPR. Untuk tahap pertama, Dewan akan memfasilitasi dengan meningkatkan sarana dan prasarana.

Novanto juga menjelaskan bahwa semua anggota Dewan direncanakan akan memiliki sub web dari website resmi DPR, dimana masyarakat akan lebih mudah mengakses masing-masing anggota dari Dapilnya.

Pimpinan Redaksi Metro TV Putra Nababan dalam kesempatan ini sangat mengapresiasi inisiatif Pimpinan DPR mau

berkunjung untuk bertukar pikiran mengenai program kerja Dewan ke depan. Menurutnya, DPR adalah sumber berita politik media massa bahkan hampir lima puluh persen berita politik adanya di DPR. Metro TV adalah Media Televisi yang banyak memberitakan berita-berita politik begitu pula Koran Media Indonesia.

“Media Group sangat mengapresiasi kedatangan Pimpinan DPR untuk berkomunikasi. Harapan kita ke depan, kerjasama pemberitaan terkait fungsi dan tugas DPR, dan juga peran dari Metro TV dan Media Indonesia bisa lebih intensif,” ungkap Putra Nababan. (as) Foto: Denus/Parle/Hr

Perjanjian Ekstradisi RI-PNG dan Vietnam Disetujui

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon Senin (9/2) sore menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (*Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea*) dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam*).

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais saat menyampaikan laporan pembahasan kedua RUU tersebut menyebutkan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih selain membawa dampak positif bagi kehidupan manusia juga telah membawa dampak negatif yang bersifat transnasional.

Perkembangan itu ternyata memberikan peluang yang lebih besar bagi

pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan dan kerja sama antar negara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral maupun multilateral.

Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini sepakat mengadakan kerja sama ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2013 di Jakarta. Selain itu kerja sama perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam telah ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta.

Pimpinan Komisi I dari Fraksi PAN ini berharap, adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini



Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais

serta hubungan Indonesia dan pemerintah Republik Sosialis Vietnam akan meningkat. Khususnya dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan.

“Dengan disahkannya kedua RUU tersebut, diharapkan dapat mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Dengan demikian, tidak ada lagi pelaku kejahatan yang dapat meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat dia melakukan kejahatan,” tambah Hanafi. (spy)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Kerja Sama Pertahanan dengan Pakistan dan Timor Leste Disetujui

DPR setuju RUU Kerja Sama Pertahanan dengan negara Timor Leste dan Pakistan melalui Rapat Paripurna DPR. Kerja sama pertahanan ini merupakan pencapaian penting bagi Indonesia sekaligus meningkatkan hubungan bilateral dan interdependensi antar negara di bidang militer.

Asril Hamzah Tanjung Wakil Ketua Komisi I DPR RI dalam laporannya di Rapat Paripurna, Senin (9/2), menyampaikan, pertahanan merupakan faktor hakiki untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara. “Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan atau dari dalam



Suasana Rapat Paripurna Pengesahan Perjanjian Pertahanan RI-Pakistan dan Timor Leste

negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya,” papar Asril di hadapan Rapat Paripurna DPR.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu dihadiri pula oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Setelah melawati pembahasan tingkat I di komisi, RUU kerja sama pertahanan ini dibawa ke pembahasan tingkat II di Rapat Paripurna. Semua fraksi menyetujui RUU ini menjadi UU. Komisi I DPR, ungkap Asril, telah mengundang kementerian terkait dan sejumlah pakar untuk merumuskan RUU ini.

Secara lengkap dua nama RUU ini adalah Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities in the field of Defence*).

Sementara RUU dengan Pakistan bernama Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on the Cooperative Activities in the field of Defence*).

Dengan disahkannya RUU ini, diharapkan Indonesia bisa berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. “Kami berharap dengan disahkannya dua RUU, keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa bernegara dan menjaga ketertiban dunia dapat terealisasi. Disamping itu, kami mengharapkan kerja sama di bidang pertahanan ini dapat menjaga hubungan baik kedua negara dan meningkatkan kesejahteraan serta kelangsungan hidup berbangsa bernegara,” jelas Asril. (mh)/foto: naefurodji/parle/hr

DPR Setujui Tim Program Pembangunan Dapil

Sidang Paripurna DPR menyetujui 31 anggota sebagai Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Menyampaikan Program pembangunan daerah pemilihan (Dapil) DPR-RI. Persetujuan dari anggota Dewan pun diketok palu oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon (F-Gerindra), selaku Pimpinan Sidang, di Gedung Nusantara II, Senin (9/02/15).

Seluruh Anggota Tim berasal dari 10 fraksi di DPR. Dari Fraksi PDI Perjuangan, yaitu Arif Wibowo, Agustina Wilujeng Pramesiti, Hendrawan Supratikno, Alex Indra Lukman, Wayan Koster, dan Sudin.

Berikutnya, dari Fraksi Partai Golkar, terdiri dari Ichsan Firdaus, Gatot Sudjito, Muhammad Lutfi, Budi Supriyanto, H.M. Salim Fakhry, dan Endang Srikarti



Suasana Rapat Paripurna persetujuan Program Pembangunan Dapil

Handayani.

Partai Fraksi Partai Gerindra mengirimkan anggotanya, yakni Supriyanto, Muhammad Syafi’, Bambang Riyanto, dan Supratman Andi Agtas.

Kemudian dari Fraksi Partai Demo-

krat ada Rinto Subekti, E. Herman Khaeron, dan Michael Watimena. Dari Fraksi Partai Amanat Nasional terdiri dari Saleh Partaonan Daulay, Daeng Muhammad, dan Totok Daryanto.

Berikutnya, Agus Sulistiyono, Ida Fauziyah, dan Marwan Dasopang dari Fraksi Partai Kebangkitan Nasional. Dari Fraksi Partai Keadilan Sosial ada Adang Daradjatun, dan Andi Akmal Pasulddin.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan diwakili Syaifullah Tamliha, dan Dimiyati Natakusuma. Kemudian dari Fraksi Partai Nasdem ada Syarif Abdullah Alkadrie. Dan yang terakhir dari Partai Hanura diwakili Dadang Rusdiana. (sf,hi)/fotodenus/parle/hr



Pimpinan Rapat Paripurna DPR Fadli Zon didampingi Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan

Dewan Tetapkan Tim Pengawas TKI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 30 orang anggotanya sebagai Tim Pengawas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Tim Pengawas Perlindungan TKI tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan pada Senin Sore (9/2/2015) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat tersebut menyampaikan nama-nama Anggota Dewan dalam Tim

Pengawas Perlindungan TKI.

Berikut adalah anggota Tim Pengawas Perlindungan TKI. Dari Fraksi PDI Perjuangan yaitu Abidin Fikri, Rieke Diah Pitaloka, Ribka Tjiptaning, Charles Honoris, Irene Yusiana Roba Putri dan Masinton Pasaribu. Selanjutnya dari F-PG yaitu Syamsul Bachri, Andi Faujiah Pujiwati Hatta, Budi Supriyanto, Aditya Anugrah Moha dan Fayakhun Andriadi.

Anggota Tim dari F-Gerindra terdiri dari Suir Syam, Elnino M. Husein Mohi, Pius Lustrilanang dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Sementara dari F-PD yaitu Dede Yusuf Macan Efendi, Edhi Baskoro Yudhoyono dan Didik Mukrianto.

Dari F-PAN antara lain Hang Ali Saputra Syah Pahan, Budi Youyastri dan M. Ali Taher Parasong. Dari F-PKB yaitu Chusnunia Chalim dan Nihayatul Wafiroh. Kemudian dari F-PKS

Ansory Siregar dan Achmad Zainuddin.

Sedangkan dari F-PPP yaitu Ermalena dan Muhammad Iqbal. Dari F-Nasdem yaitu Irma Suryani dan Patrice Rio Capella. Terakhir anggota ti dari F-Hanura yaitu Capt. Djoni Rolindrawan.

Selain menetapkan Tim Pengawas TKI, Rapat Paripurna juga menetapkan Tim Penyusun Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dan Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, serta Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (sc), foto : iwan armanias/parle/hr.

DPR Setujui Revisi UU Pilkada dan Pemda



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berdialog dengan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (9/2) di Jakarta, menyetujui revisi UU Pilkada dan UU Pemda menjadi usul inisiatif DPR.

Seperti diketahui, UU Pilkada dan UU Pemda masuk kedalam prioritas pada Prolegnas 2015-2019. Sebelumnya Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menjelaskan bahwa setelah disahkan Komisi II DPR akan segera membahasnya bersama pemerintah.

“DPR yakin pembahasan revisi UU ini dapat cepat diselesaikan, seperti UU Pemda dimana nantinya pilkada serentak dapat segera dilaksanakan, karena anggarannya sudah siap, dan harus disosialisasikan dengan baik,” kata Rambe.

Lebih lanjut, Rambe menambahkan, bahwa rencananya Komisi II akan membahas revisi UU Pilkada bersama pemerintah pada 10-14 Februari 2015. Masa sidang periode ini akan berakhir 18 Februari 2015. Revisi UU Pilkada rencananya akan disahkan sehari sebelum deadline, atau tanggal 17 Februari 2015. (nt), foto : iwan armanias/parle/hr.

Otsus Papua Plus Harus Dijadikan Prioritas

Anggota Baleg dari fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan bahwa Otsus Papua Plus sangat penting dan mendasar diterapkan bagi Masyarakat Papua. Karena itu, harus mendapatkan kajian yang serius dan dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas tahun ini.

“Kalau disetujui masuk Prolegnas tentunya lebih baik,” ujar Yandri dihadapan Rapat Paripurna DPR, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Senin, (9/2).

Hal senada disampaikan oleh Wilem Wandik dari Fraksi PD, dirinya meminta DPR lebih melihat persoalan Papua secara lebih serius.

“Ini kita bicara soal keutuhan NKRI dan eksistensi NKRI, ini diusung oleh Pemerintah daerah Papua dan saya sebagai Dapil dari Papua meminta RUU Otsus Papua dimasukkan dalam Prolegnas,” tegasnya.



Anggota Baleg dari fraksi PAN Yandri Susanto

Tercatat 37 RUU menjadi prioritas pada tahun 2015, yang terdiri atas 26 RUU usulan DPR, 10 RUU diusulkan pemerintah, dan 1 RUU merupakan usulan DPD.

Sebelum pengesahan Prolegnas, terdapat beberapa catatan dari semua Fraksi. Secara garis besar, mereka

menginginkan agar RUU tentang tembakau, kebudayaan, pekerja rumah tangga (PRT), keadilan dan kesetaraan gender KKG, serta tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dapat dimasukkan dalam agenda prolegnas. (Si), foto : naefurodji/parle/hr.

DPR Sahkan 30 Anggota Pemantau Otsus Aceh, Papua dan DIY



Rapat Paripurna Pengesahan Pemantau Otsus Aceh, Papua, dan DIY

Paripurna DPR Sahkan 30 orang anggota DPR sebagai Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Khusus Aceh, Papua dan

Keistimewaan DI Yogyakarta.

Rapat Paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Senin, (9/2).

Berikut nama dari Fraksi PDIP yaitu Komarudin Watubun, Willy M. Yoseph, Sirmadji, Tagore Abubakar, Budiman Sudjatmiko, Diah Pitaloka. Sementara dari Partai Golkar, Siti Hediati Soeharto, HM Salim Fakhry, Elion Numberi, Firmandez, Agung Widyantoro.

Dari Partai Gerindra yaitu Fadhullah, Mohamad Hekal, Andika Pandu Puragabaya, Roberth Rouw. Sementara Partai Demokrat diwakili oleh Saan Mustopa, Fandi Utomo Bahrum Daido. Dari PAN yaitu, Muslim Ayub, Hanafi Rais, Jamaluddin Jafar.

Anggota DPR dari Partai PKB yaitu Irmawan, Peggi Patricia Pattipi, Nasir Djamil (F-PKS), Muhammad Yudi Kotouky (F-PKS). Untuk PPP yaitu Moh. Arwani Thomafi, dan Anwar Idris. Partai Nasdem yaitu Bachtiar Aly dan Sulaeman L. Hamzah. Sementara Partai Hanura satu anggota yaitu Rufinus Hotmaulana Hutauruk. (Si), foto : naefurodji/parle/hr.

DPR Kecewa Isu Mobnas Lebih Menonjol Ketimbang TKI

Kalangan Komisi IX DPR menyatakan kekecewaannya lantaran isu mobil nasional bekerja sama dengan perusahaan mobil Malaysia lebih menonjol ketimbang masalah TKI. "Saya agak menyesal ternyata lawatan Presiden Joko Widodo ke Malaysia tidak ada pembicaraan terkait bagaimana sikap Indonesia menegur kepada pemerintah Malaysia. Khususnya terkait dengan pelecehan ataupun tindakan-tindakan rasialis kepada TKI. Yang lebih menonjol pembahasan soal mobil dan hubungan kerja sama antar Menteri Indonesia dan Menteri Malaysia," kata Ketua Komisi IX Dede Yusuf sebelum mengikuti rapat paripurna Senin (9/2) sore.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, perbaikan kerja sama terkait pengiriman TKI ini sangat bagus karena pengiriman TKI nonformal atau ilegal sudah di stop. Karena itu dia menyatakan sebaiknya kita mengirimkan TKI formal.

Tetapi kata Dede, selama lawatan Presiden dan pembicaraan dengan PM Malaysia, tampaknya tidak mendengar pernyataan pemerintah yang tegas terkait masalah TKI yang sekarang ramai dibicarakan, terakhir pelecehan terhadap TKI dalam iklan media Malaysia.

"Saya merasa kecewa dan anggota Komisi IX juga merasa kecewa, karena isu ini mendapat tanggapan luas di



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf

masyarakat. Pelecehan terhadap TKI juga merupakan isu yang menyangkut harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia," tegas mantan Wagub Jabar ini.

Langkah-langkah pemerintah yang

perlu dilakukan adalah perubahan atau pemutihan TKI sebanyak 150 ribu dan 100 ribu lagi merupakan TKI ilegal di Malaysia. TKI ilegal maksudnya dokumen-dokumennya telah mati,

tidak bisa diperpanjang. “Oleh karena itu saya minta agar Kementerian juga meneruskan program pemutihan. Ternyata ada biaya sebesar 200 ringgit atau sama dengan Rp 600 ribu per ke-

pala. Biaya ini harus dipersiapkan oleh negara bukan memberatkan kepada TKI,” kata Dede Yusuf menambahkan. (mp, ds,ss)/foto:naefurodji/parle/iw.

AIPA Berperan Penting Kawal Pelaksanaan Komunitas Asean

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, kehadiran *Asean Inter Parliamentary Assembly* (AIPA) semakin penting terutama dalam menjalin kemitraan parlemen Asean. Terlebih dalam memasuki Komunitas Asean di awal 2016 nanti, AIPA memainkan peran penting terutama dalam mengawal agar pelaksanaan Komunitas Asean, khususnya di bidang ekonomi benar-benar bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Hal itu dikatakan Ketua DPR, ketika menerima Sekjen AIPA PO Ram di Lantai III Gedung Nusantara III, Senayan, Kamis (12/2). Dalam kesempatan ini Ketua DPR didampingi Sekjen DPR Winantuningtyastiti, dan Deputi Persidangan dan KSAP Tatang Sutarsa serta pejabat Setjen lainnya.

Menurut Setya, selaku Ketua DPR baru, pihaknya ingin mendengar program AIPA ke depan terutama dalam waktu dekat ini. Menanggapi hal ini, Sekjen AIPA P.O Ram menjelaskan, beberapa kegiatan akan dilakukan AIPA dalam tahun 2015 ini.

Program pertama adalah Sidang AIPA tanggal 25-28 April di Kualalumpur, lalu ada sidang Komite mengenai drug (obat-obatan) tanggal 7-10 Juni



Ketua DPR RI Setya Novanto berdialog dengan Sekjen AIPA

lalu ada Kaukus yang dijadwalkan tanggal 10-11 Juli. Sidang ini kemudian diundur ke akhir bulan Juli karena bertuk dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

Selanjutnya yang keempat ada pelaksanaan sidang umum AIPA 6 sampai 12 September di Kualalumpur juga ada Kaukus di Kamboja. Lalu ada kerja sama AIPA dengan sebuah organisasi di Jerman GETZ dan memberikan

bantuan dana bantuan 5 ribu Uero. Menurut Ram, dana tersebut akan dipakai untuk mencetak buat buku-buku panduan terkait dengan anggota AIPA, seperti Philipina bagaimana parlemen negara itu sehingga semua akan terinfokan oleh semua anggota AIPA. Pada akhir acara, dilakukan tukar menukar cinderamata. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

RUU Pertembakauan Masuk Prolegnas 2015

DPR telah mengesahkan 159 RUU yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37 di antaranya menjadi RUU prioritas yang akan dibahas pada tahun 2015, diantaranya adalah RUU tentang Pertembakauan.

Untuk membahas RUU ini, DPR akan membentuk Panitia Khusus yang terdiri anggota dari Komisi IV bidang pertanian, Komisi VI bidang Industri dan perdagangan, Komisi IX bidang kesehatan, dan Komisi XI bidang keuangan.

“Nantinya dalam pembahasan RUU

tentang Pertembakauan yang akan dibahas mengenai komoditi tembakau dan dampaknya, harus dibentuk Panitia Khusus (Pansus),” kata anggota Komisi IV Firman Subagyo dari Fraksi Partai Golkar, Rabu (11/2), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Menurut Firman, yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi, DPR ketika menyusun prolegnas menggunakan parameter supaya terukur, diantaranya melihat urgensi dari UU itu diundangkan, untuk mengisi kekosongan hukum, serta dilengkapi dengan naskah akademis. Selain itu, katanya, Undang-

Undang ini disusun untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Melihat posisi RUU Pertembakauan, diungkapkannya, adanya koalisi masyarakat tembakau, dan yang anti tembakau karena menganggap tembakau penyebab dari terganggunya kesehatan. Rakyat Indonesia yang heterogen, yang juga ada sebagian masyarakat menganggap bahwa rokok adalah kultur budaya. Dari zaman ke jaman orang sudah banyak yang merokok.

Selanjutnya, Firman menegaskan setuju bahwa kesehatan perlu ditingkatkan, namun juga di dalam membuat sebuah regulasi DPR tidak dapat hanya melihat secara sepihak. DPR juga harus mempertimbangkan nasib petani tembakau, industri rokok yang telah berinvestasi, pekerja di pabrik rokok,



Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo

pengecer rokok, dan pendapatan negara terhadap cukai rokok yang mencapai Rp.1 Triliun.

Dijelaskan Firman, tembakau termasuk komoditas perkebunan tertentu, yang merupakan komoditas perkebunan yang mempunyai peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

"Ini semua harus dipertimbangkan, karena juga merupakan sumber pendapatan negara, Setuju kesehatan dikedepankan tapi jangan mematikan hak-hak hidup rakyat yang lain. Selain itu, tembakau juga dilindungi dalam UU no. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengutip penjelasan Pasal 52 bahwa tembakau itu merupakan industri strategis," tukas politisi Partai Golkar ini. (as) foto: iwan armanias/parle/hr

Sengketa Pilkada, MA Sarankan Tetap di MK



Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria

Sejumlah masukan penting berhasil dihimpun DPR dalam rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung. Salah satu saran penting adalah mempertahankan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

"Iya itu masukan yang kita peroleh dalam rapat konsultasi, MA menyarankan kewenangan kembali di MK, sementara keputusan Hakim MK karena Pilkada bukan termasuk rezim pemilu sengketa disidangkan di MA. Masukan ini akan kita bicarakan dalam pembahasan revisi RUU Pilkada bersama pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria usai rapat di Gedung MA, Jakarta, Rabu (11/2/15).

Dalam rapat konsultasi yang dihadiri sejumlah Hakim Agung tersebut terungkap beberapa kendala apabila sengketa dilaksanakan di tingkat Pengadilan Negeri (PN). Dalam RUU Pilkada ada syarat hakim yang akan menyidangkan sengketa Pilkada harus fokus - tidak boleh menyidangkan perkara lain dan minimal sudah bertugas tiga tahun, sementara hakim PN sebagian besar adalah hakim muda.

Pertimbangan lain menurut Riza, apa-

bila persidangan dilaksanakan di daerah, potensi konflik lebih tinggi karena pendukung dan kerabat berbondong-bondong ke pengadilan. Pengamanan diperkirakan akan lebih sulit.

"Dalam pertemuan juga sempat dibahas MK dinilai sudah berpengalaman dan memahami betul permasalahan. Kemudian tempat persidangan di Jakarta akan membatasi jumlah pendukung serta pengamanan lebih terjamin," tutur politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menyebut seluruh masukan yang diperoleh dalam rapat konsultasi akan dibawa dalam pembahasan revisi RUU Pilkada bersama pemerintah. Wakil rakyat dari dapil Jabar V ini berharap revisi akan menghasilkan produk legislasi yang lebih baik, sehingga proses pemilihan kepala daerah berhasil melahirkan pemimpin yang menyejahterakan rakyat. (iky) foto: naefurodjie/parle/hr

Komisi III DPR Berkomitmen Respon Pengaduan Masyarakat Soal Hukum

Komisi III DPR berkomitmen untuk mengedepankan responsivitas pengaduan masyarakat serta menyikapi permasalahan dalam penegakan hukum.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua

Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR ke Propinsi Sumatera Utara, di Gedung Polda Sumut, Rabu (11/2) siang.

Pada kesempatan itu, Komisi III menerima beberapa pengaduan masyarakat yang berasal dari Sumatera Utara. Diantaranya permasalahan terkait konflik soal tanah. Soal Tanah ini

diawali dengan peralihan atas tanah PT Kereta Api (Persero) kepada Mendagri cq. Pemerintah Kota Medan sehingga tanah dan bangunannya berpindah menjadi hak Pemerintah Kota Medan.

Kemudian hak atas tanah itu berpindah tangan ke PT Inanta, yaitu dengan perjanjian bahwa PT Inanta akan membangun rumah dinas PT Kereta Api berikut fasilitas sosial dan fasilitas umum. Untuk itu diberikan Hak Guna Bangunan (HGB-) pada PT Inanta di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kota Medan. Adapun PT Kereta Api juga akan menerima imbalan ganti rugi.

Pada tahun 1989, terjadi peralihan hak dan kewajiban dari PT Inanta kepada PT Bonauli Real Estate (BRE) yang pada intinya terjadi peralihan hak dan kewajiban serta pemberian ganti rugi dengan uang tunai kepada PT Kereta Api. Adapun kompensasi kepada PT Kereta Api akhirnya disepakati bersama PT BRE menjadi Rp13 milyar.

Namun ketika terjadi perpanjangan hak, yang juga terjadi peralihan dari PT BRE ke PT ACK, oleh Pemerintah Kota Medan, kemudian terjadi perma-



Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa

salahan karena PT ACK mengaku berutang kali mendapat penolakan untuk pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp.13 milyar kepada PT Kereta Api oleh PT Kereta Api sendiri, sehingga uang tersebut kemudian dititipkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara Cosignatie.

Bahkan diketahui pula bahwa tanah tersebut sebenarnya bukan dimiliki oleh PT Kereta Api berdasarkan surat BPN Kota Medan. Maka pemerintah

Kota Medan kemudian mengajukan PHL, yang kemudian diproses oleh PT Kereta Api.

Desmond menambahkan, permasalahan umum kali ini adalah mengenai sengketa atau konflik yang berujung pada kriminalisasi salah satu para pihak kerap kali terjadi di Indonesia, terutama dalam kasus sengketa tanah yang berujung pada konflik sosial atau konflik pribadi.

“Komisi III DPR akan melakukan tindak lanjut beberapa pengaduan masyarakat dengan mengadakan investigasi langsung ke lapangan guna mendapat hasil pengamatan langsung mengenai duduk perkara, terutama upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Utara dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan Komisi III DPR dalam agenda Rapat Kerja Komisi III DPR,” tegas Desmond. (Spy), foto : iwan armanias/parle/eka hindra.

Komisi IV Minta Kemen.LHK Prioritaskan Realisasi Program Kerakyatan



Ketua Komisi II DPR Edhy Prabowo berjabat tangan dengan Menteri LHK

Komisi IV meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan realisasi program-program kerakyatan dalam kegiatan bidang kehutanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2015.

Hal itu ditekankan dalam Rapat Kerja Komisi IV yang dipimpin Ketua Edhy Prabowo, dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, Rabu (11/2), di Gedung Parlemen. Komisi yang mem-

bidangi kehutanan ini menyetujui alokasi anggaran untuk membiayai program, diantaranya program pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung Rp1,088 Triliun, konservasi sumber daya alam dan ekosistem Rp1,547 Triliun dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan sebesar Rp308 milyar.

Patut diketahui, Komisi IV menyetujui pagu tambahan RAPBN-P Kemen LHK Tahun 2015 sebesar Rp199,6 Milyar, sehingga semula APBN Kemen LHK Tahun anggaran 2015 Rp6,468 Triliun, menjadi sebesar Rp6,667 Triliun, yang akan digunakan membiayai 13 Program bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Anggota Komisi IV Sjachrani Mataja dari Fraksi Partai Gerindra, melihat dengan kondisi anggaran yang ada menginginkan Kemen LHK dapat lebih maksimal menjaga kelestarian hutan alam.

Sjachrani menitipkan pesan kepada Menteri LHK untuk menghentikan perluasan luas perkebunan sawit. Dia mengatakan jika ada keinginan pengusaha perkebunan sawit untuk memperluas perkebunannya atau permohonan baru, mohon agar hutan alam dipertahankan, karena hutan akan menjadi suatu strategi pembangunan bagi Pemerintah.

“Jangan sampai ada lagi pengurangan kawasan hutan,” tegas Sjachrani, politisi asal dapil Kalimantan Selatan II. (as), foto : riska arinindya/parle/eka hindra.

BNPB Harus Tingkatkan Koordinasi Dengan Lembaga Lain



Anggota Komisi VIII DPR Itet Tridjajati Sumarijanto

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) harus lebih meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain. Hal tersebut diung-

kapkan anggota Komisi VIII DPR RI, Itet Tridjajati Sumarijanto usai rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB, Syamsul Maarif, Selasa (10/2) di Gedung Nusantara II Senayan Jakarta.

“Saya melihat setiap ada bencana tanggung jawab seolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab BNPB. Bahkan sering penanggulangan bencana, banjir misalnya untuk membuat sodetan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian lain (PU), namun dananya tetap mengambil anggaran BNPB. Padahal bukan tidak mungkin PU juga memiliki anggaran untuk program tersebut. Ini kan tidak efisien,” ungkap Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan.

Selain itu, dilanjutkan Itet, BNPB juga harus bekerjasama dengan Ke-

menterian bahkan pemerintah daerah yang mengatur tata ruang. BNPB harus melakukan survei, kajian, penelitian, kemudian memberikan informasi kepada kementerian lain terutama menyangkut tata ruang.

Bahkan menurutnya, dari segi teknologi, BNPB juga bisa bekerjasama dengan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan BPPT (Badan pengkajian dan penerapan teknologi) untuk mendapatkan teknologi terkini yang dapat digunakan dalam penanggulangan dan penanganan bencana.

“Disinilah saya melihat Koordinasi BNPB dengan Kementerian dan Lembaga lainnya yang masih sangat lemah,” ungkap Itet. (Ayu) foto: andri/parle/hr

Baleg: DPR Fokus Rampungkan RUU Bidang Ekonomi

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Subagyo mengungkapkan DPR akan memfokuskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam bidang ekonomi pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pertimbangan itu semata-mata melihat kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia.

“Dalam amanat konstitusi, tentunya, bumi beserta kekayaan alam Indonesia di dalamnya dimanfaatkan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Indonesia, bukan masyarakat asing,” kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/2), dalam diskusi Forum Legislasi ‘Mengkritisi Prolegnas 2014-2019 dan RUU Prioritas 2015’. Hadir sebagai pembicara bersama Firman Subagyo, Direktur advokasi PSHK Ronald Rofiandri dan Koordinator Formappi Sebastian Salang.

Menurut Firman, kondisi saat ini, ekonomi nasional berhadapan dengan situasi dimana terdapat beberapa Undang-Undang yang dianggap lebih mementingkan kepentingan asing.

“Saya tegaskan, bahwa DPR RI, DPD RI dan pemerintah sama-sama memiliki spirit anti korupsi dan berupaya menamakan jiwa merah putih dalam membangun Indonesia ke depan” katanya.

Dalam sidang paripurna beberapa hari yang lalu, DPR telah mengesahkan 37 RUU yang akan dibahas untuk Prolegnas 2015. Di mana, 26 RUU di antaranya merupakan inisiatif DPR, 10 RUU inisiatif pemerintah, dan satu (1) RUU inisiatif dari DPD RI.

DPD sebenarnya mengajukan tujuh RUU inisiatif, namun para senator sepakat meletakkan enam di antara menjadi



Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo

inisiatif DPR dan hanya mengambil satu RUU untuk dijadikan inisiatif. “Kita bersepakat, siapa yang sudah siap mengajukan RUU 2015 ini harus siap naskah akademis, naskah RUU itu sendiri, dan ada kekosongan hukum,” terang Firman.

Sementara itu, Sebastian Salang mengapresiasi keputusan DPR saat ini untuk menyelesaikan 159 rancangan undang-undang (RUU) di dalam Prolegnas hingga 2019 nanti. Menurutnya, target prolegnas itu cukup realistis karena jika dirata-rata berarti setiap komisi akan merampungkan dua RUU per tahun. “Saya kira, sudah mulai ada kesadaran baru dari DPR dengan cara buat target yang realistis,” kata

Sebastian.

Namun demikian Sebastian tetap mengingatkan masyarakat untuk memantau perkembangan Prolegnas dan proses penyusunan RUU selama lima tahun ke depan. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah kemungkinan adanya RUU titipan.

“Belajar dari masa lalu, dalam praktiknya paripurna DPR lebih banyak mengesahkan RUU jadi UU justru yang tidak ada dalam daftar Prolegnas. RUU titipan begitu,” ungkapnya. (nt/sc) foto: andri/parle/hr

Pengadaan Radar Pasif dari Ceko Bisa Dijajaki

Kerja sama Alat Utama Sistem Persewaan (alutsista) dengan Republik Ceko terus ditingkatkan setelah tahun 2012 telah ditandatangani perjanjian kerja sama pertahanan, terutama dalam pengadaan alutsista. Salah satu yang bisa dijajaki kembali adalah pengadaan radar pasif untuk pertahanan laut.

Wakil Ketua BKSAP sekaligus Anggota Komisi I DPR RI Muetya Hafid (dapil Sumut I), mengungkapkan, hal tersebut usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia Tomas Smetanka bersama Ketua DPR, Rabu (11/2). “Tadi duta besar Republik Ceko mengatakan bahwa salah satu yang bisa dilakukan kerja sama dengan Indonesia adalah radar pasif yang bisa digunakan untuk mengawasi laut-laut Indonesia,” jelas Muetya.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama dengan Republik Ceko,



Wakil Ketua BKSAP DPR Muetya Hafid

belum banyak data kemajuan yang didapat. Untuk itu, perlu dikonfirmasi kembali sejauh mana implementasi dari perjanjian tersebut. “Tahun depan akan ada pertemuan tingkat lanjut

mengenai kerja sama Alutsista,” ungkap Muetya lagi.

Mantan jurnalis ini juga sempat menyinggung soal kerja sama transportasi dan kerja sama parlemen kedua negara. Di bidang transportasi, kerja sama segera dijajaki dengan Menteri Perhubungan yang akan berkunjung ke Ceko. Indonesia ingin banyak belajar tentang pengelolaan sistem transportasi modern.

Sementara di bidang parlemen, kerja sama sudah berjalan baik. Pada periode parlemen yang baru ini, dibangun kerja sama baru pula untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua parlemen. “Karena ini periode baru, jadi membuat kesepakatan-kesepakatan baru di BKSAP setiap kali ada pergantian. Kerja sama dituangkan dalam bentuk letter of intent atau kesepakatan tertulis. Ketua DPR sudah membawa surat dalam kunjungan beliau ke Praha untuk segera ditindaklanjuti.”

(mh) foto: iwan armanias/parle/hr

Komisi VIII Pertanyakan Kecilnya Anggaran Kemen.PP&PA

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan niat pemerintah dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Selasa (10/2) di ruang rapat Komisi VIII, Senayan Jakarta.

“Kami mempertanyakan niat pemerintah untuk memberdayakan perempuan dan perlindungan anak. Pasalnya, pemerintah memberikan porsi yang sangat kecil bagi Kemendagri PP & PA ini. Anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program Kementerian



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

ini hanya 217 Miliar, yang digunakan

dalam menangani berbagai permasalahan perempuan dan anak yang ada di 34 Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota. Kondisi ini membuktikan bahwa permasalahan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan belum menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemerintah,” tegas Saleh.

Saleh tidak melihat adanya anggaran untuk program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berada di Kementerian lain selain Kemendagri PP&PA. Padahal jika ada permasalahan perempuan dan anak yang mencuat ke permukaan pasti yang disalahkan Kementerian ini.

Sayangnya Kementerian ini tidak diberikan kewenangan yang luas dan anggaran yang besar untuk menjalankan berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan kata lain, kewenangan Kemeneq PP dan PA hanya pada fungsi koordinasi, bukan kepada fungsi teknis.

Meski demikian hal itu hendaknya tidak selalu dijadikan alasan bagi Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak untuk tidak melakukan sesuatu yang maksimal dalam menjalankan program-program untuk perempuan dan anak.

“Sebenarnya masalah kewenangan Kemeneq PP & PA ini sudah sering mengemuka dalam rapat kerja dengan Menteri PP & PA. Melihat fungsi dan tugasnya yang sangat penting, kami akan mendorong Kementerian ini untuk memiliki kewenangan yang

besar dalam menjalankan program untuk perempuan dan anak. Bahkan jika perlu kami akan merevisi UU No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menjadi payung hukum keberadaan Kemeneq PP dan PA, sehingga kementerian ini memiliki wewenang penuh terhadap penanganan permasalahan perempuan dan anak,” ungkap Politisi dari Dapil Sumatera II. (Ayu), foto : andri/parle/hr.

Komisi V DPR Dukung Tambahan Anggaran Kementerian DPDTT Rp10.4 Triliun

Komisi VI DPR menyetujui dan memperjuangkan tambahan anggaran sebesar 10.4 triliun dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

Demikian salah satu butir kesimpulan Raker Komisi V DPR dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, di Gedung Nusantara, Rabu, (10/2).

Anggota DPR dari Partai Golkar Ridwan Bae mengatakan, program desa tertinggal harus dipertajam kinerjanya jangan sampai tumpang tindih.

“Desa adalah tumpuan kita semua, ini harus menjadi perhatian khusus kalau tidak diberikan perhatian kita tidak memiliki perasaan. kita bersyukur pemerintah sekarang ada program transmigrasi di tiap provinsi, kabupaten, oleh karena itu permintaan 10 triliun segera dipertimbangkan dipenuhi



Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis

dengan catatan mempertimbangkan Dapil yang menjadi perjuangan kami juga mendapat perhatian,”ujarnya.

Anggota DPR Miryam S Haryani (Fraksi Hanura) mengaku heran mengapa Kementerian DPDTT hanya mengajukan dana desa tertinggal hanya sebesar Rp. 10 Triliun. padahal sesuai amanat UU Desa seharusnya anggaran desa sebesar 10 persen.

Miryam meminta program pendamping untuk desa dihapuskan. sehingga dapat memberi ruang untuk Kepala Desa dan perangkatnya untuk mengelola dana desa tersebut. “Dengan cara ini kita dapat memberikan ruang bagi mereka untuk mengelolanya dengan benar,” jelasnya. (Si), foto : iwan armianas/parle/hr.

DPR Desak Kementerian Desa PDTT Audit Kriteria Desa Tertinggal



Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis

Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi segera melakukan audit dan menyusun kriteria yang jelas dalam menetapkan desa itu tertinggal atau tidak tertinggal.

“Daerah mana yang sudah lepas, atau belum kita bisa belajar disitu desa tertinggal, karena sudah ada 122 desa keluar dari desa tertinggal dan menyisahkan 50 desa tertinggal lagi yang mau kita entaskan,” ujarnya saat Raker dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, di Gedung Nusantara, Rabu, (10/2).

Menurut Fary, Kementerian ini jangan membuat terlalu banyak macam program yang tidak jelas. “Jadi kita

mintalah hasil kajiannya dan nanti akan kita bawa ke daerah pemilihan kita, apa saja desa yang tertinggal di Dapil kita,” jelasnya.

Khusus program transmigrasi, Dia menambahkan, perlu dilakukan pemetaan mana saja titik lokasi baru. “Kita juga bisa mengecek daerah transmigrasi baru itu, jadi kita perlu dapat pemetaannya,”katanya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, soal kriteria desa tertinggal sangat memungkinkan dikaji kembali desa mana saja yang tertinggal tersebut. “Misal saja Poso bisa dimasukkan pada desa pembinaan

khusus atau tertentu jadi bisa lebih fokus menata daerah itu,” jelasnya.

Menurut Marwan, apabila ada usulan tambahan desa yang tidak berada dalam program kabupaten tertinggal silahkan saja disampaikan kepada ke-

menterian ini.

“Kita harapkan dapat segera diintervensi, untuk Wilayah Jakarta saja masih banyak desa yang memprihatinkan minimal pada tahun 2015 kita akan memperjuangkan 5000 desa dahulu,

sementara 17 ribu desa saya sudah sampaikan tambahan untuk dimasukkan di dalam anggaran,” jelasnya. (Si), foto : riska arinindya/parle/hr.

Komisi IV Minta Realokasi Anggaran Kementan



Suasana rapat Komisi IV DPR dengan Kementan

Komisi IV DPR RI minta Kementerian Pertanian merealokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2015. Realokasi pada beberapa duplikasi anggaran di masing-masing Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian, kepada program yang lebih produktif.

“Kami (Komisi IV) minta direalokasi termasuk anggaran pengawalan, yang saya nilai anggaran pengawalan terlalu besar. Setiap direktorat jenderal pasti ada anggaran pengawalan di APBN-P,” ungkap Wakil Ketua Komisi Herman Kheron, setelah Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Senin (9/2), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Herman menjelaskan yang dimaksud anggaran pengawalan yaitu termasuk di dalamnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengawalan program di lapangan. Menurutnya, melihat besaran anggaran pengawalan sangat fantastis karena di RAPBN-P hampir Rp2 Triliun.

“Kalau semua anggaran tidak teknis hanya untuk pengawalan, saya kira tidak produktif hasilnya. Sehingga kami minta diubah lagi sampai nanti kepada rapat kerja selanjutnya pada penetapan anggaran,” tegas Herman, Politisi Partai Demokrat.

Rapat Kerja dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, dengan agenda membahas usulan APBN-P Kementerian Pertanian Tahun 2015. Komisi IV DPR RI juga menyetujui pagu tambahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2015 Kementerian Pertanian sebesar Rp16,9 Triliun. (as), foto : riska arinindya/parle/hr.

Panja Haji DPR Upayakan BPIH 2015 Turun

Anggota Komisi VIII DPR Choirul Muna mengatakan, fokus Panitia Kerja (Panja) Haji dan Umroh DPR adalah membahas masalah biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2015. Diharapkan sebelum bulan April sudah bisa ditentukan berapa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Ditemui sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR Senin (9/2) politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengatakan, selain itu membahas soal pembatasan jemaah haji. “Nanti akan kita atur dalam Panja Haji DPR berapa tahun sesudah melakukan ibadah haji, seorang baru bisa haji lagi. Misalkan nanti setelah 10 atau berapa tahun,

seseorang baru bisa haji lagi,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah turunnya harga minyak dunia akan bisa menurunkan BPIH, politisi dari Dapil Jateng ini menyatakan harga minyak turun tetapi kurs dolar ternyata tidak turun. “Ada suatu interval yang tidak kecil antara 2014 dengan 2015. Pada tahun 2014 kurs dolar ditentukan Rp 10.300. Sekarang ini ditentukan Rp 12.200, jadi intervalnya Rp 1.900 sendiri. Karena itu Panja akan mengkaji masalah ini termasuk avtur yang turun dengan kurs dolar yang naik.

Meski demikian, kata Choirul, DPR tetap inginkan agar BPIH bisa ditu-



Anggota Komisi VIII DPR Choirul Muna

runkan. Dengan berbagai macam kriteria termasuk pengurangan jumlah hari pada saat berada di Mekah-Medina. Selama ini diatur 40 hari, akan diupayakan bisa dipersingkat antara 28 sampai 30 hari, karena hanya mengatur tentang jadwal kepulangan saja.

Menurut dia, selama ini kuota haji

Indonesia dikurangi 20 persen dari 210.000 menjadi 168.800 orang calon jemaah haji. Pengurangan kuota diharapkan juga ada pengurangan hari, dan ini nanti akan dihitung termasuk pengurangan biaya hotel, catering, antar jemput atau transportasi. “Ini

akan kita atur dan dihitung semuanya oleh Panja Haji bersama pemerintah,” ungkap Choirul.

Panja Haji DPR, lanjut anggota Komisi VIII ini juga akan membahas biro-biro perjalanan haji dan umroh yang nakal seperti menelantarkan calon jemaah

haji dan umroh. “Nanti akan diumumkan siapa-siapa yang baik dan yang tidak baik. Kemenag yang akan mengumumkan biro-biro yang nakal sebab telah menyengsarakan dan merugikan masyarakat,” ia menambahkan. (mp), foto : andri/parle/hr.

Pleno Baleg Setujui Revisi UU Pilkada Hasil Panja

Seluruh fraksi di Badan Legislasi DPR RI (Baleg) menyetujui RUU tentang Revisi UU Pilkada dan RUU tentang Revisi UU Pemda hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Baleg.

Keputusan tersebut, diputuskan dalam rapat pleno Baleg dipimpin Ketua Baleg Sareh Wiyono di Ruang Rapat Baleg Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2/2015).

Selanjutnya kedua RUU tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI Senin siang ini untuk ditetapkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI, untuk kemudian dibahas bersama pemerintah.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman sebagai pengusul yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyatakan Revisi UU Pilkada dan Revisi UU Pemda untuk kepentingan bangsa yang lebih besar.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Panja Baleg Saan Mustafa melaporkan hasil pembahasan Panja harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada



Penandatanganan RUU tentang Revisi UU Pilkada dan RUU tentang Revisi UU Pemda

dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tentang Pemda.

Rapat Pleno Baleg diakhiri dengan penandatanganan draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tentang Pemda. (sc), foto : naefurodjie/parle/hr.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga dan Tim Komisi IV saat berkunjung ke distributor pupuk CV. Kembar Jaya, Jombang

Wakil Ketua Komisi IV, DPR Viva Yoga berharap kualitas pupuk bersubsidi terutama pupuk organik kualitasnya

Kualitas Pupuk Bersubsidi Harus Sesuai SNI

benar-benar mengikuti *quality control* dari SNI. “Beberapa tahun lalu kami sempat mendapati pupuk oplosan yang dicampur tanah atau bahan tertentu lainnya yang dapat mempengaruhi atau merusak kualitas tanaman, saya berharap sekarang hal itu tidak terjadi lagi. Sehingga kualitasnya benar-benar mengikuti ketentuan dari SNI,” ujar Viva dalam kunjungan spesifiknya ke distributor pupuk CV Kembar Jaya, Jombang.

Dalam kunjungan yang juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi IV, Ibnu Multazam dan anggota Komisi IV lainnya seperti I Made Urip, Darori Wonodipuro, Sjachrani Mataja, Guntur Sasono, Taufiq R Abdullah, Rofi Munawar, Fadholi, Ichsan Firdaus dan Agustina Wilujeng Pramestuti ini DPR meminta masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan distributor nakal yang mengoplos atau mencampur pupuk bersubsidi dengan bahan lain atau tanah.

Selain itu DPR juga berharap masukan dan laporan dari para petani dan masyarakat jika ditemui pupuk subsidi yang diperjual belikan. Menurut Viva berdasarkan UU Pertanian, pupuk subsidi itu bukan barang dagangan. Jikapun

beberapa waktu lalu terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi dikatakan Viva hal itu terjadi karena faktor distribusi dan alokasi yang tidak merata. (Ayu) foto: ayu/parle/hr

Lahan Tambang PT JBG Dicaplok Penambang Illegal

Tim Komisi VII DPR dipimpin Zairullah Azhar meninjau langsung pertambangan batubara di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Sekalipun hujan gerimis tak menyurutkan rombongan yang berjumlah 17 orang ke lokasi tambang yang masuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kalimantan Selatan, Kamis (05/02) lalu.

PT. Jorong Barutama Greston (JBG) adalah salah satu yang langsung ditinjau Komisi VII DPR dari lintas fraksi. Ketua tim yang juga Wakil Ketua Komisi VII Zairullah Azhar (FPKB) adalah putera daerah Kalimantan Selatan.

Seusai penjelasan singkat dari pihak JBG, rombongan langsung meninjau aktivitas tambang yang rencananya tutup beroperasi tahun 2017 mendatang. Rombongan melihat langsung bagaimana tambang yang legal bisa dicaplok dengan mudahnya dan sangat terbuka oleh penambang tanpa izin.

“Cukup luas lahan resmi kami ditambang orang tanpa izin. Banyak usaha-usaha yang sudah kami lakukan, kami hanya bisa melaporkan dan pastinya tidak bisa melakukan tindakan.” keluh I Gde Widiada, Kepala Teknik Tambang PT. JBG dihadapan anggota Komisi VII DPR RI.

Menurut I Gde Widiada, pihaknya berharap masalah pencaplokan lahan yang ditambang tanpa izin lengkap dengan menggunakan alat berat bisa diselesaikan dengan tuntas. Pihaknya sangat mengkhawatirkan untuk kedepannya dan seandainya JBG tidak beroperasi lagi, bisa jadi lahan yang ada semakin marak ditambang tanpa izin.

Mendengarkan hal itu, Zairullah Azhar menginginkan permasalahan bisa diselesaikan tanpa merugikan semua pihak terutama masyarakat Kalimantan Selatan. “Kita sengaja melihat langsung kenyataan yang terjadi

dilapangan. Semua pihak kita ajak berdialog termasuk dengan Kapolda, sehingga masalah pertambangan di Kalimantan Selatan bisa terselesaikan dengan baik,” ujar mantan bupati Tanah Bumbu.

Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan ini menambahkan kalau kedatangan rombongan yang dipimpinnya merupakan kunjungan spesifik untuk mengetahui secara langsung permasalahan pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hasil kunjungan ini akan kami

aparat penegak hukum khususnya bagi penambang illegal.

“Ini jelas jelas sangat merugikan dan harus ada tindakan tegas. Selama ini kami banyak mendapat laporan dan sekarang melihat langsung, sungguh sangat prihatin sekali dan kami akan segera mengambil tindakan konkret,” jelas Mustofa.

“Kita harus cari solusinya tentang permasalahan yang dihadapi. Apa saja permasalahan dan kendalanya di lapangan termasuk pula akan dikupas kenapa terjadi tumpang tindih lahan



Tim Komisi VII DPR dipimpin Zairullah Azhar meninjau pertambangan batubara di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.

jadikan bahan evaluasi dan masukan kepada pihak terkait, apalagi Dirjen Minerba dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar dilibatkan melihat langsung kenyataan di lapangan,” tegas Zairullah.

Anggota Dewan dari pemilihan Dapil Jawa Timur, Mustofa Assegaf (FPPP) menyatakan cukup prihatin dengan fakta masalah pertambangan. Dirinya berharap ada tindakan tegas dari

sesama pemilik izin PKP2B,” tambah politisi PPP ini.

Rombongan Tim Komisi VII DPR RI selanjutnya menggelar pertemuan berbagai pihak terkait seperti PT. Jorong Barutama Greston, PT. Adaro Indonesia, PT. Arutmin Indonesia, PT. Borneo Indobora, PT. Gunung Meratus, Direksi PT. PLN (Persero) serta Kapolda Provinsi Kalsel. (hr), foto : eka hindra/parle/hr.

DPR Tuan Rumah Peringatan International Women's Day 2015



Suasana rapat persiapan BKSAP DPR dengan perwakilan duta besar perempuan negara sahabat

Dewan Perwakilan Rakyat dipercaya untuk menjadi tuan rumah peringatan International Women's Day. Dicanakan, acara akan dilaksanakan pada 24 Maret 2015, walaupun International Women's Day diperingati setiap tanggal 8 Maret. Mengingat, DPR sedang menjalani masa reses dari 19 Februari hingga 22 Maret 2015.

Demikian salah satu kesepakatan dalam rapat persiapan, antara Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dengan perwakilan duta besar perempuan negara sahabat. Rapat dipimpin oleh Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf.

Hadir dalam rapat ini, Anggota BKSAP Evita Nursanty (F-PDI Perjuangan), Melani Leimena Suharli (F-PD), Dewie Yasin Limpo (F-Hanura), dan Wiryanti Sukamdani (F-PDI Perjuangan). Sementara, hadir pula Duta Besar dari Mongolia, Srilanka, Meksiko, Azmenia, Rumania, Lebanon, dan Kuba.

"Pertemuan ini dalam rangka membahas agenda peringatan Internasional Women's Day, yang akan diselenggarakan pada 24 Maret 2015. Di acara ini, kita akan memberikan sosialisasi atau *awareness* kepada masyarakat, pentingnya meningkatkan peran perempuan di berbagai

bidang. Dimana saat ini sudah banyak sekali perempuan mempunyai prestasi yang bagus," jelas Nurhayati, usai pertemuan di ruang rapat BKSAP, Gedung Nusantara III, Lantai 4, Jumat (6/02/15).

Misi dalam acara itu, tambah Politisi F-PD ini, akan ada sosialisasi pentingnya meningkatkan peran perempuan, khususnya di dalam membuat keputusan-keputusan. Jadi, bukan hanya terpenuhinya kuota perempuan sebesar 30 persen dalam parlemen, tapi perempuan lebih lagi diperdayakan dalam level membuat keputusan.

"Kita ingin sekali terus mengangkat *awareness*, bahwa masyarakat harus memahami pentingnya peningkatan peran perempuan. Tidak hanya diberdayakan, tapi peningkatan peran perempuan dalam mengambil keputusan. Tadi juga sudah di sepakati, nantinya akan diadakan pertemuan rutin antara parlemen perempuan DPR RI dengan para Dubes perempuan yang ada di Indonesia," jelas Politisi asal Dapil Jawa Timur V ini.

Hal senada juga diungkapkan Anggota BKSAP Melani Leimena Suharli. Ia menjelaskan, dalam acara ini akan ditonjolkan mengenai visi perempuan dalam politik. Selain itu, dibahas juga keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi.

"Nanti, kita tidak hanya membicarakan mengenai politik tetapi bagaimana proses demokrasi itu bisa berlangsung. Kemudian, bagaimana visi perempuan ke depan dalam menata masa depannya di dunia politik," imbuh Politisi asal Dapil DKI Jakarta II.

Direncanakan, akan diundang sebagai peserta dari berbagai unsur. Diantaranya legislator, perwakilan pemerintah, perwakilan duta besar perempuan, NGO, *business woman*, hingga mahasiswa maupun pelajar.

"Untuk para pelajar perempuan, tujuannya memberikan pengalaman dari dini tentang pembelajaran politik, pendidikan politik bagi perempuan-perempuan remaja," tambah Melani. (sf) Foto: Andri/Parle/Hr.

Komisi VII DPR Dorong Pengembangan PLTMH

Provinsi Sumatera Utara mempunyai banyak sumber energi (Energi Baru Terbarukan) yang bisa dijadikan sebagai energi pembangkit *minihydro* (PLTMH). Kapasitas 1 unit PLTMH sebesar 7MW sampai dengan 10 MW.

"Oleh karena itu Komisi VII DPR mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan PLTMH," ungkap Ketua Komisi VII Kardaya Warnika kepada Parle usai pertemuan dengan jajaran Direksi PLTGU Belawan,

Sumatera Utara, kemarin sore (Kamis, 5/2/2015).

Kenapa harus diberikan prioritas, tanya Kardaya, karena penghijauan lahan sebagai faktor *sustainability* air akan terjaga. Teknologinya dapat disediakan oleh produk lokal/dalam negeri. Kemudian, lanjutnya, sistem pengelolaan dan SDM tersedia di dalam negeri dan mampu menjadi stimulan pengembangan ekonomi di Provinsi Sumut.

Dengan berbagai macam pertimba-



Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika



ngan tersebut, menurut politisi Partai Gerindra ini, jika pemerintah sudah mengembangkan PLTMH 5 tahun yang lalu dipastikan krisis listrik di Sumatera Utara tidak terjadi, karena ada potensi sekitar 100 MW yang mampu disumbangkan dari PLTMH.

Selain itu, tegasnya, harga listrik dari

PLTMH relatif murah hanya sebesar 8 sen dollar per kWh dibandingkan dengan harga listrik per kWh dari PLTD sebesar 30 sen dollar atau dengan perbandingan 1 banding 4.

Saat ditanya terkait dengan dukungan legislasi, Kardaya menjawab sebagai bentuk dukungan konkret maka

Komisi VII merencanakan membuat UU khusus Energi Baru Terbarukan (EBT). Dengan harapan potensi EBT khusus di Provinsi Sumut dapat dikembangkan dan dioptimalisasikan pada tahun mendatang. (iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Banyak BUMN Tidak Bekerja Pada Bidangnya

Sejumlah perusahaan plat merah banyak dikritik Komisi VI DPR RI, lantaran banyak yang membangun anak perusahaan tapi tidak sesuai dengan bidang usahanya. Pembinaan menyeluruh perlu dilakukan oleh Menteri Negara BUMN kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih (Dapil Bali), mengemukakan hal tersebut usai mengikuti rapat kerja dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Kamis malam (5/2). "Misalnya BUMN yang bukan hotel menggarap kapal. Yang bukan kapal menggarap pelabuhan. Pembinaan ekstra luar biasa harus dilakukan oleh Menteri BUMN kita, karena dari yang kita tahu sekarang ini, BUMN harus menjadi agen pembangunan," ungkap Sumarjaya.



Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih

Untuk mengejar profit, sambung Sumarjaya, banyak BUMN membangun anak perusahaan di luar tugas usahanya. Menurut politisi Golkar itu, keuntungan BUMN secara keseluruhan sekitar Rp40 triliun. Sangat jauh bila dibandingkan dengan anggaran PMN yang totalnya mencapai Rp72,9 triliun dalam APBN-P 2015. Sementara Rp48 triliun lebih dialokasikan untuk BUMN.

"Jadi kita harus mencari benefit dari BUMN. Mampu enggak BUMN ini mengelola dan membangun pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Inilah mindset yang perlu disadari dari keberadaan BUMN," ucap Sumarjaya. (mh) Foto: iwan armanias/parle/hr.

Komisi IV Tampung Pro Kontra Nelayan Belawan terhadap PerMen KPP



Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI saat menerima aspirasi nelayan Belawan

Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR tentang Perikanan dan Kelautan, ke Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Gabon, Sumatera utara, dipimpin Siti Hediati Soeharto menga-

dakan dialog dengan forum dan ikatan nelayan sekaligus meninjau langsung pelabuhan, Jumat (2/6).

"Kami ingin tahu, apa saja yang menjadi keluhan para nelayan saat ini. Terlebih lagi dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan Menteri Perikanan dan Kelautan," kata anggota DPR Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Salah satu yang disoroti nelayan setempat adalah mengenai peraturan baru Menteri Perikanan dan Kelautan yang baru dikeluarkan melalui Kepmen-KP RI No.1 tahun 2015 dan Kepmen-KP RI No. 2 tahun 2015.

Perwakilan dari Forum Usaha Bersama, Amsalino mengatakan, ikan di Indonesia saat ini sudah bermigrasi ke negara lain karena banyak pengusaha yang menangkap ikan dengan menggunakan alat yang tak ramah lingkungan. Ini membuat ikan-ikan yang seharusnya ada di Indonesia berpindah ke negara lain. Amsal mengatakan, saat ini di Medan, sedikitnya ada 1.200-an kapal nelayan yang terimbas akibat adanya Kepmen-KP tersebut. Sehingga ditakutkan, dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, akan

membuat banyak nelayan yang akan kehilangan pekerjaannya sebagai nelayan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV yang lebih dikenal dengan nama Titeik Soeharto ini mengatakan bahwa dirinya banyak mendengar keluhan dari forum nelayan. Dimana menurutnya ada yang pro terhadap peraturan itu, dan ada yang kontra dengan keluarnya kebijakan tersebut.

“Inilah tujuan kami melakukan kunjungan ini. Kami menjadi tahu kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan terkait dengan peraturan itu, kami juga sudah minta agar ada petunjuk teknis dari penerapan peraturan ini. Sehingga hal tersebut tidak menjadi berbenturan dengan nelayan. Memang dimana-mana ada pro dan kontra, tapi ingatlah, bahwa tidak ada pemerintah yang ingin rakyatnya sengsara,” tandasnya. (ry) foto: ray/parle

Sumut Alami Defisit Listrik Hingga 300 MW



Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika gelar pertemuan dengan jajaran Direksi PLTGU Belawan

Tahun 2014 kebutuhan listrik di Provinsi Sumatera Utara kurang lebih sekitar 1.659-1.700 MW atau meningkat sebesar 10 persen dibandingkan tahun 2010 yaitu 1.200 MW. Pasokan listrik dalam kondisi normal antara 1.376-1.400 MW sehingga Provinsi Sumut mengalami defisit listrik sebesar 279-300 MW.

“Dalam kondisi *peak* defisit ini meningkat hingga mencapai 330 MW. Dampaknya Provinsi Sumut mengalami krisis listrik,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika kepada Parlemen disela-sela pertemuan Tim Kunker Komisi VII dengan jajaran Direksi PLTGU Belawan, Kamis (5/2/2015).

Menurutnya, faktor penyebab terjadinya krisis listrik di

Provinsi Sumut tahun 2014, diantaranya keterlambatan tambahan pasokan listrik dari pembangkit PLTU 2x200 MW Pangkalan Susu. Kemudian, lanjutnya, keterlambatan pengerjaan *overhaul* pada PLTGU sektor Belawan selama kurang lebih 2 bulan karena adanya persoalan hukum yang menjerat staf manajemen PT PLN (Persero) yang membawahi pembangkit PLTGU Gas Turbin (GT) 1.2, GT 2.2 dan PLTG LOT 3.

Kardaya menambahkan, keterlambatan supply MFO/HSD dari PT Pertamina (Persero) karena pasokan bahan bakar ini dilakukan dengan menggunakan sistem STS (*Ship to Ship*) yang lokasinya di Tanjung Uban sehingga rentan terhadap risiko cuaca.

Keterlambatan ijin tambahan pasokan listrik dari PT Inalum sebesar 45 MW dan keterlambatan ijin pembangunan PLTA Asahan 3 (2x90 MW) serta keterlambatan COD PLTU Nagan Raya 2x95 MW unit 1 dan 2, dan rendahnya kinerja PLTU Labuan Angin sehingga mengurangi kemampuan pasokan listrik di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

“Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, maka Komisi VII DPR memandang perlu untuk melakukan kunjungan spesifik ini ke Provinsi Sumut, agar terjadi akselerasi kesinambungan penyelesaian masalah listrik di Sumbagut,” ujar Kardaya.

Kunjungan spesifik Komisi VII DPR dipimpin langsung Ketua Komisi VII Kardaya Warnika diikuti 5 anggota lintas fraksi (Donny Maryadi Oekon F-PDIP, Bowo Sidik Pangarso F-PG, Ramson Siagian F-Gerindra, Mat Nasir F-Demokrat, dan Iskan Qolba Lubis F-PKS). (iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Anggota DPR Interupsi Terkait Tambahan Anggaran BPJS

Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka dan Budi Supriyanto mempertanyakan kucuran anggaran sebesar RP5 triliun yang diberikan Kementerian Keuangan kepada BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial). Hal tersebut diungkapkannya lewat interupsi dalam sidang paripurna DPR RI, Jumat (13/2) di Gedung Nusantara II Senayan Jakarta.

“Saya mempertanyakan kucuran anggaran sebesar RP5 Triliun yang diberikan Kementerian Keuangan untuk BPJS sebagai PMN (Penyertaan Modal Negara). Padahal sesuai dengan UU BPJS, badan ini merupakan badan nirlaba. Jadi

anggaran yang diberikan kepada BPJS ini bentuknya apa, pinjaman atau bukan,” ujar Rieke.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IX lainnya, Budi Supriyanto, yang mempertanyakan penambahan anggaran oleh Kementerian Keuangan kepada BPJS yang dibahas bersama Komisi 11.

“Kami dikagetkan dengan tambahan dana untuk BPJS oleh Kementerian Keuangan dengan Komisi 11 yang dikatakan untuk menutup devisa negara. Setahu kami BPJS itu bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bukan



Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka

juga badan keuangan, dan di Paripurna telah jelas disebutkan bahwa BPJS itu menjadi mitra kerja Komisi IX bukan mitra kerja Komisi 11,” jelas anggota Fraksi Parta Golkar dari Dapil Jawa Tengah X ini.

Sebagai anggota Komisi IX, Budi dan Rieke merasa sejauh ini belum ada diskusi atau pembicaraan dengan BPJS terkait tambahan anggaran tersebut. Oleh karena pihaknya meminta sidang paripurna DPR RI yang tengah berlangsung untuk menunda keputusan perubahan APBN 2015.

“Selain itu, ada beberapa catatan lain dari Komisi IX salah satunya terkait data masyarakat miskin yang menerima BPJS yang dikatakan sebanyak 88 juta jiwa. Kami mohon diberikan data yang jelas *by name dan by address*, 88 juta jiwa itu siapa saja?,” tambah Budi. (Ayu)/foto:naefurodji/parle/iw.

Premi Asuransi Pertanian Diharapkan Tidak Terlalu Mahal



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi didampingi anggota Komisi IV lainnya saat temu wicara dengan para petani di Jombang

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi berharap agar premi asuransi pertanian kepada para petani tidak terlalu mahal. Hal tersebut diungkapkan dalam temu wicara dengan para petani di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang Jawa Timur, Kamis (5/2)

“Asuransi pertanian merupakan program pemerintah untuk meminimalisir kerugian para petani ketika gagal atau hasil panennya turun yang disebabkan oleh hama, banjir, dan bencana alam lainnya. Untuk program

ini pemerintah menganggarkan dana sebesar 250 miliar,” ungkap Politisi PAN dari Dapil Jatim IX ini kepada wartawan.

Sayangnya, kata Viva Yoga, program dengan tujuan baik itu terlihat kurang sempurna tatkala mendapati masukan dari para petani akan biaya premi asuransi yang dinilai cukup tinggi. Oleh karena itu dia berharap agar pemerintah dapat menurunkan premi yang sebesar 180 ribu per hektar per masa tanam menjadi lebih murah lagi. Walaupun petani hanya membayar 20

persennya saja, yakni sebesar 36 ribu rupiah, tapi biaya pembelian bibit dan pupuk cukup memberatkan petani.

“Kalau gratis sama sekali saya juga tidak setuju, agar petani tetap berhati-hati dan serius terhadap usahanya yang memang memiliki resiko. Saya berharap asuransi pertanian ini tidak hanya untuk petani padi saja, melainkan juga petani tanaman lainnya yang juga cukup beresiko,” tambah Viva.

Dilanjutkan Viva, saat ini pemerintah memang belum menentukan asuransi mana yang akan menjadi asuransi pertanian. Namun yang pasti asuransi itu harus yang kredibel, yakni selain mampu memberikan premi yang tidak tinggi, juga dapat memberikan kemudahan bagi petani ketika ingin mengklaim. Lebih dari itu menurutnya dalam asuransi ini diperlukan peran serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk ikut menangani program asuransi pertanian ini.

“Perlu peran serta OJK karena anggaran yang dikucurkan pemerintah dalam program ini tidak sedikit, bahkan jika kelak program ini dijalankan di seluruh wilayah Indonesia juga akan menampung dana masyarakat (petani) yang sangat besar. Oleh karena itu diperlukan pihak yang ahli di bidang keuangan untuk mengawasi asuransi yang dipilih pemerintah kelak,” paparnya. (Ayu) foto: ayu/parle



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi dua Watua DPR RI (Korpolkam dan Korkesra) mengadakan pertemuan dengan para peneliti dan analisis Setjen DPR RI, Kamis (12/02)
Foto: iwan Armanias/Parle



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menanam bambu petung di bantaran kali Ciliwung, Bogor, Kamis (12/02)
foto:Naefurodji/Parle



Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR-RI ke Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB), Gabion, Sumatera Utara, Jumat (6/2) foto:RAY



Tim Komisi III DPR RI meninjau Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan dipimpin Wakil Ketua Komisi Desmond J. Mahesa, Rabu (11/02) Foto: Supriyanto/Parle



Tim Komisi VII DPR RI meninjau Istana Anak Yatim di Desa Bumbu Batu Licin, Kalsel dipimpin Wakil Ketua Komisi Zairullah Azhar, Jumat (06/02) Foto: Eka Hindra/Parle